



PERENCANAAN LIBATKAN MASYARAKAT Penataan Kawasan Kumuh Lebih Menjurus

YOGYA (KR) - Program penataan kawasan kumuh yang sudah mulai digenjet tahun ini, dipastikan akan kembali dilanjutkan pada tahun depan. Bahkan penataan akan lebih menjurus lantaran masyarakat yang tinggal di kawasan kumuh bakal dilibatkan sejak proses perencanaan atau penyusunan Detail Engineering Design (DED).

Kepala Bidang Permukiman dan Saluran Air Limbah Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) Kota Yogya, Hendra Tantular mengungkapkan, proses penyusunan DED akan dilakukan sejak awal tahun. "Kami akan panggil komunitas-komunitas masyarakat yang memiliki kesiapan. Targetnya, pada triwulan pertama sudah selesai DED-nya," ungkapnya, Senin (2/11).

Sepanjang tahun ini, dari 35 kelurahan yang masuk dalam kategori kawasan kumuh, baru 7 kelurahan yang sudah memiliki DED. Masing-masing ialah Kelurahan Suryatmajan, Keparakan, Gowongan, Warungboto, Pandeyan, Giwangan dan Brontokusuman. Seluruhnya sudah berhasil ditata menggunakan dana bantuan dari pemerintah pusat senilai Rp 8,5 miliar.

Teknis penataan disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Di antaranya penguatan talut permukiman, penanganan jalan lingkungan, pembuatan saluran air hujan dan lainnya. Sedangkan penyusunan DED untuk tahun depan, menurut Hendra, sangat tergantung dari kesiapan komunitas masyarakat. Apalagi pemerintah pusat melalui Program Peningkatan Kapasitas Permukiman (P2KP) turut menerjunkan Tim Fasilitator Lapangan (TFL) untuk memberikan pendampingan.

"Yang jelas DED untuk tahun depan lebih

mantap. Selain elemen masyarakat kami undang, kami juga difasilitasi membuat Rencana Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan (RKPKP). Apalagi masing-masing kawasan kumuh itu sudah dilengkapi profilnya," terang Hendra.

Meski demikian, optimalisasi penataan kawasan kumuh tersebut sangat tergantung dari regulasi berupa peraturan daerah (perda). Hendra menambahkan, draf rancangan perda sekaligus naskah akademik sudah diselesaikan dan kini masuk dalam usulan Program Legislasi Daerah (Prolegda) 2016. Ia berharap, kalangan dewan dapat membahas rancangan perda terkait penataan kumuh lebih awal, sehingga maksimal pertengahan tahun sudah tuntas.

Keberadaan perda tersebut menjadi landasan bagi pemerintah pusat dalam memberikan bantuan pendanaan. Pasalnya, seluruh proyek penataan kawasan kumuh sangat mengandalkan kucuran dana bantuan pemerintah pusat.

"Bantuannya itu tidak tanggung-tanggung. Bisa mencapai puluhan miliar rupiah. Makanya, jangan sampai kesempatan itu disia-siakan," tandasnya.

Anggota Badan Legislasi DPRD Kota Yogya, Rifki Listianto mengaku, pihaknya sudah menerima usulan rancangan perda dari pemkot yang hendak dibahas tahun depan. Namun pihaknya belum bisa memastikan kejelasan waktu pembahasan lantaran belum ditetapkan secara resmi sebagai Prolegda 2016. "Regulasi yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat, memang harus didahulukan. Tapi baru bisa dipetakan setelah ada penetapan Prolegda," terangnya. (Dhi)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pemukiman dan Prasarana	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 03 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005